

<b>KODE</b>		<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>
<b>1</b>		<b>2</b>
26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
26	01	Koordinasi, Konsultasi Harmonisasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
26	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan
26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
26	07	Bantuan Hukum Advokasi Permasalahan Hukum
26	08	Pendamping Penyusun Renja Peraturan Perundang-undangan (PERDA INISIATIF)
26	09	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
26	10	Penyusunan Produk Hukum Daerah
26	11	Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum
26	12	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)
27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27	01	Fasilitasi Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah
27	02	Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3d Dari Daerah Induk Ke Daerah Pemekaran
27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
27	04	Fasilitasi Pemantapan Sotk Pemerintah Daerah Otonom Baru
34		Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik
34	01	Peningkatan pelayanan publik
34	02	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
34	03	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP
34	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM
35		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
35	01	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
35	02	Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah
35	03	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan
36		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan Umm
36	01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
36	02	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
37		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Bvaluasi Bidang Pembangunan
37	01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
37	02	Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
37	03	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
37	04	Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
38		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Monitoring Bidang Perekonomian
38	01	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian
38	02	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
38	03	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
38	04	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan
38	05	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
39		Program Koordinasi, Fasilitas, Dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Rakyat
39	01	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
39	02	Koordinasi Pembinaan UKS/M
39	03	Peningkatan Pemberdayaan Lansia
39	04	Penanggulangan NAPZA dan PMS

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
39	05	Pembinaan Drumband
39	06	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan
39	07	Fasilitasi Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional
39	08	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi organisasi wanita
39	09	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	10	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerjs. dan Transmigrasi
39	11	Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda
39	12	Peningkatan koord. dan fasilitasi pengembangan olahraga
40		Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
40	01	Pembinaan Mental Spiritual
40	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
41		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
41	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
41	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial kalangan masyarakat
41	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
41	04	Sosialisasi HAM
41	05	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas
41	06	Forum Kerukunan Umat Beragama
41	07	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan
41	08	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
41	09	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
41	10	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
41	11	Sosialisasi Bahaya radikalisme dan Terorisme di kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh masyarakat
41	12	Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
41	13	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
41	14	Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
41	15	Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)
41	16	Pelatihan Kader Bela Negara
42		Program Pendidikan Politik Masyarakat
42	01	Penyuluhan kepada masyarakat
42	02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
42	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik
42	04	Penyusunan data base partai politik
42	05	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
42	06	Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol
42	07	Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai politik
42	08	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
42	09	Forum Lintas Partai Politik
42	10	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
42	11	Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Umum
43		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
43	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
43	02	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga
43	03	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
43	04	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa
43	05	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
43	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
43	07	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
43	08	Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah
43	09	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
44		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
44	01	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
44	02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
44	03	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa
45		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
45	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perunda

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN III****PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 47 /KPTS/408.12/2017****TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018****KODE REKENING PENDAPATAN**

KODE	URAIAN
1	2
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Pajak Daerah I)</b>
<b>4.1.1.01.</b>	<b>Pajak Hotel</b>
4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10.	Motel
4.1.1.01.11.	Cottage
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13.	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14.	Gubuk Pariwisata
<b>4.1.1.02.</b>	<b>Pajak Restoran</b>
4.1.1.02.01.	Restoran
4.1.1.02.02.	Rumah Makan
4.1.1.02.03.	Café
4.1.1.02.04.	Kantin
4.1.1.02.05.	Katering
4.1.1.02.06.	Warung
4.1.1.02.07.	Bar
4.1.1.02.08.	Jasa Boga
<b>4.1.1.03.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03.	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04.	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05.	Pameran
4.1.1.03.06.	Diskotik
4.1.1.03.07.	Karaoke
4.1.1.03.08.	Klub Malam
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar
4.1.1.03.11.	Permainan Bowling
4.1.1.03.12.	Pacuan Kuda
4.1.1.03.13.	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.14.	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.15.	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.16.	Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.17.	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.18.	Pertandingan Olahraga

KODE	URAIAN
1	2
4.1.1.04.	<b>Pajak Reklame</b>
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02.	Reklame Kain
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06.	Reklame Udara
4.1.1.04.07.	Reklame Apung
4.1.1.04.08.	Reklame Suara
4.1.1.04.09.	Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10.	Reklame Peragaan
4.1.1.05.	<b>Bajak Penerangan Jalan</b>
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.05.02.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
4.1.1.07.	<b>Pajak Parkir</b>
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir
4.1.1.08.	<b>Pajak Air Tanah</b>
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.
4.1.1.09.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.11.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan</b>
4.1.1.11.01.	Ashes
4.1.1.11.02.	Batu Tulis
4.1.1.11.03.	Batu Setengah Permata
4.1.1.11.04.	Batu Kapur
4.1.1.11.05.	Batu Apung
4.1.1.11.06.	Pajak Mineral bukan logam
4.1.1.11.07.	Pajak Batuan (non sirtu)
4.1.1.11.08.	Pajak Batuan (sirtu)
4.1.1.12.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
4.1.1.13.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.08.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.09.	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.01.12.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.13.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan

KODE	URAIAN
1	2
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.2.02.11.	Retribusi Penyeberangan di Air
4.1.2.02.12.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03.	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.3.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplisabkan</b>
4.1.3.01.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
4.1.3.01.01.	Bank Jatim
4.1.3.01.02.	Bank Perkreditan Rakyat
4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Air Minum
4.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha
4.1.3.02.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>
4.1.3.02.01.	BUMN .....
4.1.3.03.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>
4.1.3.03.01.	Perusahaan Patungan
4.1.4.	<b>Lain-lain Pendapatan AsU Daerah yang Sah</b>
4.1.4.01.	<b>HasU Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Diplisabkan</b>
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sitaan
4.1.4.02.	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03.	<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada BPD
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito Pada BRI
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito Pada BNI
4.1.4.03.04.	Pendapatan Bunga Piutang
4.1.4.03.05.	Rekening Deposito pada Bank Mandiri
4.1.4.04.	<b>Tuntutan Gantl Kerugian Daerah</b>
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang Daerah

KODE	URAIAN
1	2
4.1.4.05.	<b>Komisi, Potongan dan Selisih NUai Tukar Rupiah</b>
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari Pihak Ketiga
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari Pihak Ketiga
4.1.4.06.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08.	Bidang Kententrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4.1.4.06.09.	Bidang Sosial
4.1.4.06.10.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.1.4.06.11.	Bidang Pangan
4.1.4.06.12.	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.13.	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.14.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4.1.4.07.	<b>Pendapatan Denda Pajak 1)</b>
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.08.	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.09.	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.10.	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan
4.1.4.11.	<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum
4.1.4.12.	<b>Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>

KODE	URAIAN
1	2
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.03.	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4.1.4.13.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD
4.1.4.15.01.	Pendapatan Dari BLUD
4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain
4.1.4.16.01.	Pendapatan Lain-Lain
4.1.4.16.02.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan
4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari
4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung
4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo
4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari
4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo
4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung
4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari
4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku
4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi
4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo
4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak
4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo
4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto
4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan
4.1.4.17.16.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan
4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro
4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo
4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo
4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo
4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan
4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru
4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar
4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk
4.2.	Dana Perimbangan
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi



KODE	URAIAN
1	2
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.2.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus Fisik
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus Reguler
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
4.2.3.02.02.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)
4.2.3.02.03.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
4.2.3.02.05.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
4.2.3.02.06.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
4.2.3.02.07	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan
4.2.3.02.08.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibah
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01.	Pemerintah
4.3.1.01.02.	Hibah Dana BOS
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4.3.1.03.01.	Badan/lembaga/ orgasisasi swasta dalam negeri
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan .
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.2.	Dana Darurat
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pujuk dari Provinsi
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .
4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian.
4.3.4.01.03.	Dana Desa
4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus

KODE	URAIAN
1	2
4.3.4.02.01.	Dana Otonomi Khusus .
4.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.
4.3.5.02.	Bantuan keuangan dari kabupaten
4.3.5.02.01.	Bantuan keuangan dari Kabupaten.....
4.3.5.03.	Bantuan keuangan dari kota
4.3.5.03.01.	Bantuan keuangan dari Kota .....

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN IV****PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 47 /KPTS/408.12/2017****TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018****KODE REKENING BELANJA**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>
<b>5.1.1.01.01.</b>	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
<b>5.1.1.01.02.</b>	Tunjangan Keluarga
<b>5.1.1.01.03.</b>	Tunjangan Jabatan
<b>5.1.1.01.04.</b>	Tunjangan Fungsional
<b>5.1.1.01.05.</b>	Tunjangan Fungsional Umum
<b>5.1.1.01.06.</b>	Tunjangan Beras
<b>5.1.1.01.07.</b>	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
<b>5.1.1.01.08.</b>	Pembulatan Gaji
<b>5.1.1.01.09.</b>	Iuran Asuransi Kesehatan
<b>5.1.1.01.10.</b>	Uang Paket
<b>5.1.1.01.11.</b>	Tunjangan Badan Musyawarah
<b>5.1.1.01.12.</b>	Tunjangan Komisi
<b>5.1.1.01.13.</b>	Tunjangan Badan Anggaran
<b>5.1.1.01.14.</b>	Tunjangan Badan Kehormatan
<b>5.1.1.01.15.</b>	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
<b>5.1.1.01.16.</b>	Tunjangan Perumahan
<b>5.1.1.01.17.</b>	Uang Duka Wafat/Tewas
<b>5.1.1.01.18.</b>	Uang Jasa Pengabdian
<b>5.1.1.01.19.</b>	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
<b>5.1.1.01.20.</b>	Tunjangan Profesi Guru
<b>5.1.1.01.21.</b>	Iuran Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja
<b>5.1.1.01.22.</b>	Iuran Tunjangan Jaminan Kematian
<b>5.1.1.01.23.</b>	Tunjangan Reses
<b>5.1.1.01.24.</b>	Tunjangan Transportasi
<b>5.1.1.01.25.</b>	Dana Operasional
<b>5.1.1.01.26.</b>	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>
<b>5.1.1.02.01.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
<b>5.1.1.02.02.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
<b>5.1.1.02.03.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
<b>5.1.1.02.04.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
<b>5.1.1.02.05.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
<b>5.1.1.02.07.</b>	Tambahan Penghasilan Guru
<b>5.1.1.03.</b>	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
<b>5.1.1.03.01.</b>	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
<b>5.1.1.03.02.</b>	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
<b>5.1.1.04.</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak</b>
<b>5.1.1.04.01.</b>	Biaya pemungutan PBB
<b>5.1.1.05.</b>	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>
<b>5.1.1.05.01.</b>	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
<b>5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>

KODE	URAIAN
1	2
5.1.1.06.01.	Insentip Pemungutan Retribusi Daerah.
<b>5.1.2.</b>	<b>BELANJA BUNGA</b>
<b>5.1.2.01.</b>	<b>Bunga Utang Pinjaman</b>
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
<b>5.1.2.02.</b>	<b>Bunga Utang Obligasi</b>
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi .....
<b>5.1.3.</b>	<b>BELANJA SUBSIDI</b>
<b>5.1.3.01.</b>	<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan ....
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga
<b>5.1.4.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>
<b>5.1.4.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>
5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat
<b>5.1.4.02.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya(S)</b>
5.1.4.02.01.	Pemerintah Provinsi
5.1.4.02.02.	Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>5.1.4.03.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa</b>
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa
<b>5.1.4.04.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)</b>
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah BUMD/BUMN
<b>5.1.4.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>
5.1.4.05.01.	Badan/lembaga/organisasi swasta
<b>5.1.4.06.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>
5.1.4.06.01.	Kelompok masyarakat/perorangan
<b>5.1.4.07.</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
<b>5.1.5.</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>
<b>5.1.5.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>
5.1.5.01.01.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
<b>5.1.5.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat
<b>5.1.5.03.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
<b>5.1.6.</b>	<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>5.1.6.01.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi .....
<b>5.1.6.02.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
<b>5.1.6.03.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
<b>5.1.6.04.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
<b>5.1.6.05.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
<b>5.1.6.06.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan.</b>
5.1.6.06.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan
<b>5.1.6.07.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kepada Pemerintah Provinsi</b>
5.1.6.07.01.	Belanja Bagi Hasil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kepada Pemerintah Provinsi.

KODE	URAIAN
1	2
5.1.7.	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK</b>
5.1.7.01.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....
5.1.7.02.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota</b>
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....
5.1.7.03.	<b>Belanja Bantuan Kenangan kepada Bssa</b>
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa .....
5.1.7.04.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerlntah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya</b>
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.05.	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
5.1.8.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>
5.1.8.01.	<b>Belanja Tidak Terduga.</b>
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Borongan
5.2.1.03.	<b>Uang Lembnr</b>
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04.	<b>Jasa Pemungutan</b>
5.2.1.04.02.	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5.2.1.06.	<b>Honorarium Pengelolaan Dana BLUD</b>
5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakal Habls Kantor</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
5.2.2.01.12.	Belanja Kotak Saran
5.2.2.01.13.	Belanja Barang Pasca MOW/MOP
5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
5.2.2.02.07.	Belanja Pakan Ternak
5.2.2.02.08.	Belanja bahan pupuk
5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan
5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
5.2.2.02.14.	Belanja Peralatan Industri
5.2.2.02.15.	Belanja Induk Ikan
5.2.2.02.16.	Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo / Lukisan / Hiasan Binding
5.2.2.02.17.	Belanja Souvenir
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Baku Peternakan
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.	Belanja telepon
5.2.2.03.02.	Belanja air
5.2.2.03.03.	Belanja listrik
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10.	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara
5.2.2.03.12.	Belanja software
5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan
5.2.2.03.14.	Belanja Layanan Kesehatan
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Media
5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Laundry
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Medis/Paramedis
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Cleaning Service
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5.2.2.03.31.	Belanja Biaya Retribusi
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan
5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah
5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.09.	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Stom Wales
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen
5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Ukur
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Pemotong
5.2.2.10.13.	Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC)
5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman panti sosial
5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta
5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan
5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja
5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian kbusus dan hari-hari tertentu</b>
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi
5.2.2.16.	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis
5.2.2.18.	<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>
5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.18.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.19.	<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>
5.2.2.19.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.19.02.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman
5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.22.	<b>Belanja Barang Dana BOS</b>
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.23.	<b>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
5.2.2.24.	<b>Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.2.2.24.01.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat.
5.2.2.24.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga
5.2.2.25.	<b>Belanja Barang Jasa BLUD</b>
5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.26.	<b>Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>



KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.26.01.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.26.02.	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.03.	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.04.	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
<b>5.2.2.27.</b>	<b>Belanja Kompensasi</b>
5.2.2.27.01.	Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum
5.2.2.28.	<b>Belanja Jasa Profesi</b>
5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan Banjir
5.2.3.01.32.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Irigasi
5.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.01.34.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Situs Purbakala
5.2.3.01.35.	Belanja modal pengadaan tanah untuk tugu batas kota
5.2.3.01.36.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih
5.2.3.01.37.	Pengadaan Tanah untuk sarana umum kawasan wisata
5.2.3.01.38.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi Lahan
5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>
5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan bulldozer
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan eskavator
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan erane
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Escalator
5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift / elevator
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
5.2.3.04.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/eidomo/andong
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan ksravan
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolly
5.2.3.05.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor</b>
5.2.3.05.01.	Belanja modal Pengadaan kapal motor

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.05.02.	Belanja modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09.	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.05.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tempel
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu raldt
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5.2.3.07.07.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02.	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04.	Belanja modal Pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian
5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan
5.2.3.09.11.	Belanja modal pengadaan mesin diesel
5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
5.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Karamba
5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Papan Data
5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel
5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Terpal
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Card Reader
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang
5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.12.	Belanja modal pengadaan Tenda/Terop
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Antrian
5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Penyangga LCD.
5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
5.2.3.13.12.	Belanja Modal Mimbar Podium
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu
5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangldr/sendok/garpu/pisau
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan Majig Jar
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.14.11.	Belanja Modal Trolly Food
5.2.3.14.12.	Belanja Modal Kompor Mesin Pengering
5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Watyer Furifer
5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air
5.2.3.14.15.	Belanja Modal Water Heater
5.2.3.14.16.	Belanja Modal Kompor Biogas
5.2.3.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Mesin penyedot debu
5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Karpets
5.2.3.15.08.	Balanja Modal Pengadaan Jemuran
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System
5.2.3.16.06.	Belanja Modal pengadaan Wireles set
5.2.3.16.07.	Belanja modal VCD/DVD palyer
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV
5.2.3.16.09.	Belanja Modal Tape Mobil
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximlli
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHP
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan seismograph
5.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5.2.3.18.10.	Belanja modal Pisk Finder
5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran
5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Centrifuge Bxtractor Test
5.2.3.18.14.	Belanja Modal Sound Lever Meter
5.2.3.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Disto Meter
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Altimeter
5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan
5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda
5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan
5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Kontruksi Sumur Bor/Gas
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Konservasi
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu
5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan*) Bangunan</b>
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
5.2.3.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi
5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang
5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar
5.2.3.26.16.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Stadion Olah Raga
5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah
5.2.3.26.18.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Menara
5.2.3.26.19.	Belanja modal Pengadaan konstruksi / Pembelian Tempat Tanaman
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara
5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Unit Pembenihan Rakyat
5.2.3.26.22.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Penerangan Jalan dan Taman
5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam
5.2.3.26.24.	Belanja modal Sarana dan Prasarana Persampahan
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura
5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Peta Tematik
5.2.3.28.	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pahatan
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan batu alam
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik
5.2.3.29.	<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan ternak
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman
5.2.3.29.04.	Dst.....
5.2.3.30.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pentungan
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine



KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
5.2.3.30.15.	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.2.3.30.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
5.2.3.30.17.	Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bos
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana Bos.
5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
5.2.3.36.01.	Belanja modal pengadaan instalasi central gas medis

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN V****PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 47 /KPTS/408.12/2017****TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018****KODE REKENING PEMBIAYAAN**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya</b>
<b>6.1.1.01.</b>	<b>Pelampauan penerimaan PAD</b>
<b>6.1.1.01.01.</b>	<b>Pajak Daerah</b>
<b>6.1.1.01.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>
<b>6.1.1.01.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
<b>6.1.1.01.04.</b>	<b>Lain-Lain PAD yang sah</b>
<b>6.1.1.02.</b>	<b>Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan</b>
<b>6.1.1.02.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>
<b>6.1.1.02.02.</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>
<b>6.1.1.02.03.</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
<b>6.1.1.02.04.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
<b>6.1.1.03.</b>	<b>Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>
<b>6.1.1.03.01.</b>	<b>Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
<b>6.1.1.03.02.</b>	<b>Penerimaan Lain-lain</b>
<b>6.1.1.03.03.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
<b>6.1.1.03.04.</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
<b>6.1.1.03.05.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya</b>
<b>6.1.1.04.</b>	<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>
<b>6.1.1.04.01.</b>	<b>Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung</b>
<b>6.1.1.04.02.</b>	<b>Belanja Pegawai dari Belanja Langsung</b>
<b>6.1.1.04.03.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
<b>6.1.1.04.04.</b>	<b>Belanja Modal</b>
<b>6.1.1.04.05.</b>	<b>Belanja Bunga</b>
<b>6.1.1.04.06.</b>	<b>Belanja Subsidi</b>
<b>6.1.1.04.07.</b>	<b>Belanja Hibah</b>
<b>6.1.1.04.08.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
<b>6.1.1.04.09.</b>	<b>Belanja Belanja Bagi Hasil</b>
<b>6.1.1.04.10.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>
<b>6.1.1.04.11.</b>	<b>Belanja Belanja Tidak Terduga</b>
<b>6.1.1.05.</b>	<b>Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan</b>
<b>6.1.1.05.01.</b>	<b>Uang jaminan</b>
<b>6.1.1.05.02.</b>	<b>Potongan Taspen</b>
<b>6.1.1.05.03.</b>	<b>Potongan Beras</b>
<b>6.1.1.05.04.</b>	<b>Askes</b>
<b>6.1.1.06.</b>	<b>Kegiatan lanjutan</b>
<b>6.1.1.06.01.</b>	<b>Kegiatan lanjutan</b>
<b>6.1.1.07.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Pembiayaan</b>
<b>6.1.1.07.01.</b>	<b>Pelampauan Pencairan Dana Cadangan</b>
<b>6.1.1.07.02.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>
<b>6.1.1.07.03.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
<b>6.1.1.07.04.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
<b>6.1.1.07.05.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah</b>
<b>6.1.1.07.06.</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi</b>

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
6.1.1.08.	<b>Penghematan Pengeluaran Pembiayaan</b>
6.1.1.08.01.	<b>Penghematan Pembentukan Dana Cadangan</b>
6.1.1.08.02.	<b>Penghematan Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah</b>
6.1.1.08.03.	<b>Penghematan Pembayaran Pokok Utang</b>
6.1.1.08.04.	<b>Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6.1.2.	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6.1.2.01.	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6.1.2.01.01.	<b>Pencairan Dana Cadangan nomor .....</b>
6.1.3.	<b>Haall Penjualan Kehayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
6.1.3.01.	<b>Haall penjualan perusahaan milik daerah/BUMD</b>
6.1.3.01.01.	<b>Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD</b>
6.1.3.02..	<b>Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga</b>
6.1.3.02.01.	<b>Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga</b>
6.1.4.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
6.1.4.01.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>
6.1.4.01.01.	<b>Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah</b>
6.1.4.02.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain</b>
6.1.4.02.01.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain</b>
6.1.4.03.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank</b>
6.1.4.03.01.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank</b>
6.1.4.04.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>
6.1.4.04.01.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>
6.1.4.05.	<b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah</b>
6.1.4.05.01.	<b>Obligasi atas nama pemerintah daerah</b>
6.1.4.05.02.	<b>Obligasi atas nomor pemerintah daerah</b>
6.1.5.	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
6.1.5.01.	<b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
6.1.5.01.01.	<b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah ....</b>
6.1.6.	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
6.1.6.01.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah</b>
6.1.6.01.01.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah</b>
6.1.6.01.02.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah</b>
6.1.6.01.03.	<b>Penerimaan piutang daerah dari lain lain pendapatan yang sah</b>
6.1.6.02.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah</b>
6.1.6.02.01.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah</b>
6.1.6.03.	<b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain</b>
6.1.6.03.01.	<b>Pemerintah daerah.....</b>
6.1.6.04.	<b>Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank</b>
6.1.6.04.01.	<b>Bank...</b>
6.1.6.05.	<b>Penerimaan Piutang daerah dari lembaga Keuangan bukan bank</b>
6.1.6.05.01.	<b>Lembaga keuangan bukan bank .....</b>
6.1.6.06.	<b>Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir</b>
6.1.6.06.01.	<b>Penerimaan Kembali investasi Dana Bergulir</b>
6.1.6.06.02.	<b>Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat</b>
6.1.6.07.	<b>Penerimaan Piutang Revolving</b>
6.1.6.07.01.	<b>Penerimaan piutang.</b>
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>
6.2.1.	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>

KODE	URAIAN
1	2
6.2.1.01.	<b>Pembentukan Duma Cadangan</b>
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.	<b>Penyerlaan Modal (Inveslaal) Pemerintah Daerah</b>
6.2.2.01.	<b>Badan usaha milik pemerintah (BUMN)</b>
6.2.2.01.01.	BUMN
6.2.2.02.	<b>Badan usaha milik daerah (BUMD)</b>
6.2.2.02.01.	Bank Jatim
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum
6.2.2.02.04.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha
6.2.2.03.	<b>Badan usaha milik swasta</b>
6.2.2.03.01.	Badan usaha milik swasta
6.2.2.04.	<b>Dana Bergulir</b>
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir
6.2.3.	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
6.2.3.01.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman
6.2.3.01.02.	Rekening Dana Investasi
6.2.3.02.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain</b>
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah
6.2.3.03.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>
6.2.3.03.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank .....
6.2.3.04.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</b>
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank
6.2.3.05.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman...
6.2.3.06.	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain</b>
6.2.3.06.01.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.3.07.	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank</b>
6.2.3.07.01.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank .....
6.2.3.08.	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank</b>
6.2.3.03.01.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.09.	<b>Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo</b>
6.2.3.09.01.	Pelunasan Obligasi daerah atas nama .....
6.2.3.09.02.	Pelunasan Obligasi daerah atas nomor .....
6.2.3.10.	<b>Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo</b>
6.2.3.10.01.	Pembelian kembali obligasi atas nama .....
6.2.3.10.02.	Pembelian kembali obligasi atas nomor .....
6.2.4.	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6.2.4.01.	<b>Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah</b>
6.2.4.01.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
6.2.4.02.	<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain</b>
6.2.4.02.01.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain

KODE	URAIAN
1	2
6.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Revolving
6.2.4.03.01.	Pemberian Pinjaman Revolving.
6.2.4.03.02.	Pemberian Pinjaman.
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**